



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan Penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu menyertakan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3 );
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1990 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari

usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi, PT. Bank Jateng, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian, Perusahaan Daerah Purwa Aksara, PT. PRPP Jawa Tengah dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

- a. akuntabilitas; dan
- b. kepastian hukum.

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUMD;
- c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. PT. Bank Jateng sebesar Rp 23.769.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  1. setoran tunai sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
  2. *sharing* hasil Aset Manajemen Unit, laba ditahan tahun lalu dan cadangan umum sebesar

- Rp 13.769.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan mekanisme penganggaran secara *Cash In – Cash Out*;
- c. Perusahaan Daerah Purwa Aksara sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - e. Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma sebesar Rp 8.074.600.000,00 (delapan milyar tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - f. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pengembangan/ekspansi dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Daerah.
  - (3) Penyertaan modal Daerah kepada PT Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan sebagai pemenuhan rasio kecukupan modal dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan pelayanan perbankan.
  - (4) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk penambahan modal usaha dan pengadaan sarana dan prasarana.
  - (5) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk pengembangan/ekspansi dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Daerah.
  - (6) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penganggaran kembali atas penyertaan modal pada Tahun 2016 yang belum direalisasikan untuk pembangunan sarana produksi dan penurunan tingkat kehilangan air.
  - (7) Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f dipergunakan untuk memperkuat permodalan dan peningkatan pelayanan.

- (8) Jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 21 November 2016

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH (16/2016)

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**  
**SETDA KABUPATEN GROBOGAN**

  
**MOCHAMAD FACHRUDIN**  
**NIP. 19670817 199403 1 012**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2017 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



## Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- b. Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN      LEMBARAN      DAERAH      KABUPATEN      GROBOGAN  
TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
 GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK  
 DAERAH TAHUN 2017

---

JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
 KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

NO	NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN		
		S.D. TAHUN 2016	TAMBAHAN TAHUN 2017	TOTAL
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	PD. BPR BKK PURWODADI	24.500.000.000,00	5.000.000.000,00	29.500.000.000,00
2	PD. BPR PURWA ARTHA	11.237.350.000,00	2.500.000.000,00	13.737.350.000,00
3	PD. PURWA AKSARA	3.706.668.000,00	500.000.000,00	4.206.668.000,00
4	PDAM PURWA TIRTA DHARMA	29.373.148.254,00	8.074.600.000,00	37.447.748.254,00
5	PD. ANEKA USAHA PERTANIAN	2.673.750.000,00	-	2.673.750.000,00
6	PT. PRPP JAWA TENGAH	531.000.000,00	-	531.000.000,00
7	PT. BANK JATENG	28.237.000.000,00	23.769.000.000,00	52.006.000.000,00
8	PT. JAMKRIDA JATENG	-	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>100.258.916.254,00</b>	<b>40.043.600.000,00</b>	<b>140.302.516.254,00</b>

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI